

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* . Jakarta: Kencana, 2013.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Boedi, Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: CV Teruna Grafica, 2008.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- I Gusti Ngurah Gede Susila. *Kejahatan Sertifikat Tanah Ganda Dalam Perspektif Modus, Akibat Hukum, dan Solusi Kritis Penyelesaian Masalah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Irene, Eka Sihombing. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisaksi, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim . *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok: Kencana, 2016.
- Koesparmo Irsan dan Armansyah. *Panduang Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing-Anggota IKAPI, 2015.
- Muhammad, Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muhammad, Iilham Arisaputra. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rianto Adi . *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* . Jakarta: Yayaan Obor Indonesia, 2004.

- Riduan, Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Romi Sihombing. *Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Rusmadi Murad. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*. Jakarta: Mandar Maju, 2013.
- Salim, HS. *Teknik Pembuat Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Santoso Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Solahudin Pugung. *Perihak Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sulhan, et.al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Tehupeiory Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2012.
- Utomo Hatta Isnaini Wahyu. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Wasjito dan Hadi Arnomo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta : Kencana , 2019.
- Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

N.G Yudara “ Pokok-Pokok Kajian Bahasan Diseputar Kedudukan Akta PPAT sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Otentik (Makalah disampaikan pada Seminar dan Rakernas Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPT), Jakarta 8 Juni 2001

Meita Djohan Oe, " Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah", Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, ISSN:1907-560X

Dian Cahyaningrum " Pemberantasan Mafia Tanah Vol. XIII, Nomor 23/I/Puslit/Desember/2021"
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf akes 12 Oktober 2022 jam 23.00 WIB

I Gusti Bagus Yoga Prawira, Jurnal Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah, Volume IV, 2016 DOI:
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/290/248>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang nomor 04 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah;

Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 01 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

CNN Indonesia "Tanah Bersertifikat di RI Baru Capai 72 Juta Bidang"
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204171319-92-602391/tanah-bersertifikat-di-ri-baru-capai-72-juta-bidang>, diakses 20 Mei 2022

Labuhanbatusatu, "Waspada, e-KTP Palsu Banyak Beredar, Begini Cara Ceknya!", <https://www.labuhanbatusatu.com/2021/04/05/waspada-e-ktp-palsu-banyak-beredar-begini-cara-ceknya/> akses jam 16.25 tanggal 10 September 2022

Suhaiela Bahfein " "Jangan Mudah Tertipu, Begini Cara Cek Keaslian Sertifikat Tanah", <https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/09/080000521/jangan-mudah-tertipu-begini-cara-cek-keaslian-sertifikat-tanah?page=all>. diakses tanggal 21 September 2022 jam 02.47

